

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Harmonisasi norma antara UU HKPD, PP No. 35 Tahun 2023, dan Perda Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam pemungutan opsen PKB karena masih terdapat beberapa disharmoni terkait kewenangan pemberian insentif fiskal dan mekanisme penetapan NJKB. Konflik antara Pasal 39 Perda Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 dan Pasal 5 PP No. 35 Tahun 2023 menunjukkan adanya pertentangan norma vertikal, sementara perbedaan pengaturan NJKB berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam dasar penghitungan PKB dan opsen PKB. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi opsen PKB di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya konsisten dengan asas kepastian hukum.
2. Relaksasi pajak melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak setelah Opsen PKB berlaku penuh, karena berdampak pada besaran pajak terutang, perlindungan hukum atas pembayaran berdasarkan dasar hukum yang lemah, serta potensi risiko moral berupa penundaan pembayaran. Secara yuridis, kebijakan ini juga bermasalah karena keputusan gubernur tidak cukup kuat untuk mengatur kewajiban publik secara massal, berpotensi mengurangi penerimaan opsen kabupaten/kota tanpa keterlibatan mereka, dan tidak sepenuhnya memenuhi

asas legalitas. Akibatnya, kebijakan tersebut dinilai tidak cukup sah untuk mengubah kewajiban opsen PKB dalam UU HKPD dan berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan daerah yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu menerbitkan aturan pelaksana teknis yang memperjelas makna "insentif fiskal" dalam Pasal 84 UU HKPD, khususnya instrumen hukum mana yang sah untuk memberikan insentif yang memengaruhi basis penghitungan opsen PKB. Klarifikasi itu dapat dituangkan melalui revisi PP No. 35 Tahun 2023 atau petunjuk teknis bersama antar-kementerian. DPR RI dan pemerintah juga perlu menyelaraskan Pasal 9 ayat (4) UU HKPD dengan Pasal 8 PP No. 35 Tahun 2023 agar mekanisme penetapan NJKB tidak menghasilkan dua angka berbeda sebagai dasar penghitungan PKB dan opsen PKB.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menghapus ketentuan Pasal 39 Perda No. 12 Tahun 2023 yang memberi Gubernur kewenangan menerbitkan Keputusan Gubernur yang memengaruhi basis opsen PKB. Program relaksasi PKB perlu beralih ke instrumen yang tepat yaitu Peraturan Gubernur untuk relaksasi umum, atau Perda jika menyentuh dasar pengenaan pajak, dengan cakupan yang dibatasi pada sanksi administratif tanpa mengurangi pokok PKB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggoro, Damas Dwi, Indriani, and R. An An Andri Hikmat. *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Malang: UB Press, 2023.
- Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi ke-3. Sinar Grafika, 2020.
- Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*. Universitas Indonesia Press, 2019.
- Halim, and Iqbal. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ke-4. UPP STIM YKPN, 2022.
- Hutagalung, Edward M. *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Sinar Harapan, 2018.
- Kusumadi. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. FH UII Press, 2020.
- Mahfud M. D. *Politik Hukum Di Indonesia*. Edisi terbaru. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Manan. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. FH UII Press, 2020.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Penerbit Andi, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada, 2021.
- Miharja, M. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. CV Cendekis Press, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-8. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Siahaan, Marihot Pahaha. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi. Rajawali Pers, 2020.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.

Sugianto. *Hukum Pajak Daerah: Perkembangan Pengaturan Dan Penerapannya*. Cetakan ke-2. Refika Aditama, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/42 tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Jurnal

A Ishni Bukit Jaya. "Implikasi Undang-Undang Hubungan Pusat Dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak Dan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9252>.

Bello, Petrus CKL. "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral?" *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (2023): 98–112.

Daud, M. R. "Kepastian Hukum Dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch. Al-Qisth Law Review" 6(2) (2023). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/16312/8501>.

Fijihadi, Ayaturrohman, and Nynda Fatmawati. "Tantangan Dan Kontroversi Terhadap Dampak Serta Implikasi Dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231>.

- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *JKHKP* 3(2) (2025). <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1320>.
- H., Susanto. "Fragmentasi Regulasi Perpajakan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Iklim Investasi Regional: Studi Terhadap Implementasi UU HKPD." *Jurnal Hukum Pembangunan* 52(4) (2022): 789–812. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home>.
- Hamzah. "Konflik Norma Horisontal Dalam Sistem Perundang-Undangan Perpajakan Indonesia: Telaah Atas Asas Lex Specialis Dan Lex Posterior." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52(1) (2022): 45–67. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1234>.
- Hidayat, R, and A Nugroho. "Desain Piggyback Tax Dalam Kerangka Federalisme Fiskal: Pelajaran Bagi Indonesia." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* 3(2) (2021): 112–134. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/jurnal>.
- Kurniawan, Pebi. "Opsen Pajak Daerah Dalam UU HKPD: Analisis Kebijakan Dan Implikasi Fiskal Daerah." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 4(2) (2023): 112–28. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PKN>.
- Lim, Setiadi Alim. "Reformulasi Pajak Daerah: Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Provinsi Di Indonesia." *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 5, no. 1 (2013): 65–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v5i1.126>.
- Marlia, Rina, Penalaran Deduktif, and Induktif Dan. "Penalaran Deduktif, Induktif Dan Bahasa Dalam Penulisan Ilmiah." *Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16818–24.
- Meinarsari, Alit Ayu, and Harsanto Nursadi. "Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi." *Jurnal Syntax Literate* 7 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>.
- Nabillah, Tahsyah. "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law Dalam Perspektif Teori Hukum Murni." *Legalita*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2003>.
- Nashrullah, Jauhar. "PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>.

- Nashwa Fadila Dewi, Putri Nur Wisudawati, Puspita Puspa Anugrah, and Nisa Livani Marselia. "The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 17(1) (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.219>.
- Nurhadiantomo. "Harmonisasi Hukum Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia: Perspektif Teoritik Dan Praktikal." *Jurnal Yustisia* 10(1) (2021): 89–108. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia>.
- Nurhayati. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Peraturan Daerah Pajak: Tinjauan Terhadap Konsistensi Regulasi Di Era Desentralisasi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10(3) (2021): 412–30. <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.
- Nurmaningsih. "Kepastian Hukum Dan Kepatuhan Pajak Daerah Pasca Berlakunya UU HKPD: Studi Empiris Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 12, no. 2 (2023): 201–18. <https://jih.ejournal.unri.ac.id>.
- Nurmantu, Safri. "Prinsip Netralitas Fiskal Dalam Desain Kebijakan Pajak Daerah: Analisis Terhadap UU HKPD." *Jurnal Pajak Indonesia* 6(1) (2022): 30–52. <https://jpi.stan.ac.id>.
- Nursafitri, Pangestika Indah, and Ery Agus Priyono. "Struktur Pajak Pusat Dan Daerah Dalam Hukum: Analisis Reformasi Perpajakan. Notarius" 17(1) (2024). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/71139/pdf>.
- Prasetyo, Adrian Budi. "Desentralisasi Fiskal Dan Kapasitas Pajak Daerah Pasca Reformasi Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 28(1) (2021): 45–60. <https://scholarhub.ui.ac.id/jiao>.
- Prasetyo, Adrian Budi. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Antarpemerintahan Dalam Sistem Desentralisasi Fiskal Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 6(1) (2023): 55–78. <https://jurnal.unair.ac.id/index.php/JHBBC>.
- Praviesta, Melati Surya, Evi Yulistiyowati, and Endah Pujiastuti. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020." *Semarang Law Review* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3852>.

- Riswanto. "Komparasi Model Piggyback Tax Dalam Sistem Federal Dan Desentralisasi: Pelajaran Bagi Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52(3) (n.d.): 601–20. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home>.
- S, Balqish Az-Zahra. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2024. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.
- Saptono, Prianto Budi. "General Tax Provisions and Procedures Issues on the Omnibus Law in Indonesia." *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.09.2021.p11744>.
- Sitorus, Rolib. "Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan." *Law Pro Justita* 4, no. 2 (2019): 64–87. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/514>.
- Sukma, Sinta Ade, and Eko Primananda. "TINJAUAN YURIDIS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023." *Amicus Curiae* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/4cfr735>.
- Wahab, Abdul, and Ida Surya. "Harmonization of Legal Regulations in Realizing Good Government." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 0–9.
- Yasin, Bukhari, and Irma Mangar. "Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah." *JURNAL HUKUM SASANA* 12, no. 1 (2026): 34–42. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4704>.

D. Website

- Ahza, N Al. "Pemberlakuan Opsen: Menakar Prospek Piggyback Tax Untuk Mengerek PAD." Direktorat Jenderal Pajak, 2025. <https://www.pajak.go.id/en/node/113659>.
- Asahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. "Pendapatan Daerah Dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor." 2025. <https://bpkad.asahankab.go.id/index.php/2025/04/09/opsen-pajak/>.

- Asmarani, Nora Galuh Candra. "Banyak Keluhan Soal Respon PKB, Begini Respon Bapenda Jateng." DDTC News, 2026. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1817334/banyak-keluhan-soal-kenaikan-pkb-begini-respons-bapenda-jateng>.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. "Pengenal Opsen Pajak Daerah Menurut UU HKPD: Definisi, Jenis, Dan Skema Pelaksanaan," 2023.
- "Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah," 2024. https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2798/target_dan_realisasi_pendapatan_daerah_tahun_anggaran_2024%0A.
- DDTCNews, Redaksi. "Intrepetasi P3B Harus Dengan Itikad Baik, Apa Arti Itikad Baik?" DDTC News, 2020. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/19862/interpretasi-p3b-harus-dengan-itikad-baik-apa-arti-itikad-baik>.
- Detikjateng. "Benarkah Opsen Bikin Pajak Kendaraan Di Jateng Naik? Ini Jawabannya," 2026. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8357000/benarkah-opsen-bikin-pajak-kendaraan-di-jateng-naik-ini-jawabannya>.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Piagam Wajib Pajak: Menakar Kepastian Hukum Dalam Bingkai Teori Lawrence Friedman," 2025. <https://www.pajak.go.id/en/node/117082>.
- "DJP, DJPK, Dan Pemda Perkuat Sinergi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan Negara Dan Daerah Lebih Lanjut Di: <https://Pajak.Go.Id/Id/Siaran-Pers/Djp-Djpk-Dan-Pemda-Perkuat-Sinergi-Perpajakan-Untuk-Tingkatkan-Penerimaan-Negara-Dan>." pajak.go.id, 2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-djpk-dan-pemda-perkuat-sinergi-perpajakan-untuk-tingkatkan-penerimaan-negara-dan>.
- Elnizar, Normand Edwin. "Mengurai Benang Kusut Onrechtmatige Overheidsdaad Di Bawah Kewenangan PTUN." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629653abc655e/mengurai-benang-kusut-onrechtmatige-overheidsdaad-di-bawah-kewenangan-ptun/>.

- Indarwati, Sri Mulyani. "Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." Jakarta, 2021. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Akhir-Pemerintah-terhadap-RUU-Hubungan-Kuangan-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Pemerintahan-Daerah-1638873962.pdf>.
- Karisna Mega Pasha. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Dalam Otonomi." kpu.go.id, 2025. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8440_kewenangan-pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-dalam-otonomi.
- Kimall. "Opsen Pajak: Strategi Piggyback Tax Untuk Meningkatkan PAD Tanpa Beban Tambahan." Citra Global Consulting, 2025. <https://citraglobalconsulting.com/opsen-pajak/>.
- Mettanews.id. "Opsen PKB, Gelombang Protes Dan Adaptasi Kebijakan Pusat: Catatan Kritis Untuk Jawa Tengah," 2026. <https://mettanews.id/opsen-pkb-gelombang-protes-dan-adaptasi-kebijakan-pusat-catatan-kritis-untuk-jawa-tengah/>.
- News, DDTc. "Bagaimana Ketentuan Skema Opsen PKB Dalam UU HKPD? Simak Penjelasannya," 2023. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/46105/bagaimana-ketentuan-skema-opsen-pkb-dalam-uu-hkpd-simak-penjelasannya>.
- Ortax. "Mengenal Skema Opsen Pajak Daerah," 2023. <https://ortax.org/mengenal-skema-opsen-pajak-daerah>.
- "Pemberian Insentif Fiskal Daerah." kemenkeu.go.id, 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/post/pemberian-insentif-fiskal-daerah-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>.
- Pratama, Pandu Yudha. "No Title." <https://laporgub.jatengprov.go.id/>, 2025. <https://laporgub.jatengprov.go.id/storage/complaint/2025-01-09/25010921364429.pdf>.
- Redaksi DDTCNews. "Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?" DDTC News, 2023. <https://news.ddtc.co.id/review/konsultasi/45576/ada-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-bagaimana-ketentuan-pemungutannya>.

- Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023," 2023. <https://jateng.bps.go.id/publication/2023/02/28/jawa-tengah-dalam-angka-2023.html>.
- Untar, FH. "Hans Kelsen Dan Revolusi Dalam Pemikiran Hukum Abad Ke-20." fh.untar.ac.id, 2021. <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>.
- Wildan, Muhamad. "Pemda Se-Jawa Tengah Sepakati Kerja Sama Opsen Pajak Kendaraan." DDTC News, 2024. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1807616/pemda-se-jawa-tengah-sepakati-kerja-sama-opsen-pajak-kendaraan>.
- Wildan, Muhammad. "Pemerintah Akhirnya Terbitkan PP Ketentuan Umum Pajak Daerah." DDTC News, 2023. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795180/pemerintah-akhirnya-terbitkan-pp-ketentuan-umum-pajak-daerah>.